

## **ANALISIS FAKTOR -FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI INDONESIA**

**Nurainun<sup>1</sup>, Salsabila Balqis Siregar<sup>2</sup>, Putra Pratama Harahap<sup>3</sup>, Eko Pranata Sinaga<sup>4</sup>,  
Tiur Malasari Siregar<sup>5</sup>**

[ainunppkn@mhs.unimed.ac.id](mailto:ainunppkn@mhs.unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [salsabilasiregar303@gmail.com](mailto:salsabilasiregar303@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[putrapratama.3213111044@mhs.unimed.ac.id](mailto:putrapratama.3213111044@mhs.unimed.ac.id)<sup>3</sup>, [ekopranataasinaga@gmail.com](mailto:ekopranataasinaga@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[tiur.malasari@gmail.com](mailto:tiur.malasari@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Negeri Medan

### **ABSTRAK**

Kemisikinan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di suatu negara. Setiap wilayah yang ada disuatu negara tentunya memiliki angka kemiskinan yang berbeda-beda dan faktor yang berbeda-beda. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian studi Pustaka, data diperoleh melalui artikel jurnal, BPS dan kajian literatur lainnya. Hasil penelitian kemiskinan faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran juga menjadi perhatian serius, dengan sejumlah besar penduduk yang konsumtif, Kendala infrastruktur yang buruk, sistem birokrasi yang rumit, dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang optimal. Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah perbaikan implementasi kebijakan, distribusi bantuan yang tepat sasaran, peningkatan infrastruktur, pengawasan yang efektif, dan upaya nyata dalam meningkatkan sektor pertanian. Koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terlibat menjadi kunci dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Faktor, Upaya Pemerinta.

### **PENDAHULUAN**

Salah satu permasalahan yang terjadi pada suatu negara adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan ketidakmampuan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun kelompok, yang membuat mereka rentan terhadap munculnya permasalahan sosial lainnya. Kemiskinan dianggap sebagai kondisi di mana hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang, baik pria maupun wanita, tidak terpenuhi dengan layak untuk menjalani dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>1</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami permasalahan kemiskinan tersebut. Banyak strategi yang telah diimplementasikan oleh lembaga legislatif lingkungan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, meskipun pada kenyataannya, belum ada opsi yang dapat sepenuhnya mengatasi masalah kemiskinan hingga saat ini.<sup>2</sup>

Kemiskinan telah menjadi fokus penelitian yang menarik seiring perkembangan ilmu-

---

<sup>1</sup> Anisah Salsabila Nasution and Khairina Tambunan, 'Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara', *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3.1 (2022), 11–25.

<sup>2</sup> Reza Juanda and Muhammad Kahpi, 'Jurnal Ekonomika Indonesia Volume 12 Nomor 1 URL : <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomika> PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH , TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh', 12 (2021), 19–31.

ilmu sosial. Laju industrialisasi dan munculnya berbagai konsep pembangunan ekonomi telah mendorong banyak studi sosial, terutama yang berkaitan dengan dampaknya terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Di Indonesia, penelitian tentang kemiskinan mengalami peningkatan signifikan ketika pemerintah Orde Baru dengan tekun melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, termasuk upaya penanggulangan kemiskinan<sup>3</sup>. Kemiskinan di suatu wilayah dianggap sebagai isu serius karena dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Individu yang mengalami kemiskinan seringkali tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, yang dapat mengakibatkan kekurangan gizi. Selain itu, mereka cenderung memiliki akses pendidikan yang terbatas, terutama pada tingkat menengah ke bawah, sehingga menghadapi kesulitan dalam bersaing di pasar tenaga kerja. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan masalah pengangguran. Situasi ini menjadi dasar pemikiran bahwa pengentasan kemiskinan merupakan suatu keharusan. Meskipun tidak mungkin menghilangkan kemiskinan secara total, namun dapat diupayakan pengurangannya melalui program pembangunan yang berkelanjutan<sup>4</sup>.

Isu kemiskinan telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin telah diimplementasikan melalui berbagai perencanaan, kebijakan, dan program pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang beragam. Proses pengentasan dan pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan dan diintegrasikan secara holistik. Kemiskinan timbul karena disparitas kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga sebagian masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan atau menikmati hasil Pembangunan<sup>5</sup>.

Melihat permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang sampai saat ini masih terus terjadi, maka pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan yang terjadi di Indonesia serta paya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka (*library research*). Menurut Zed studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber dan mengumpulkannya dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari referensi tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan dalam penelitian (Zed, 2004 dalam<sup>6</sup>).

---

<sup>3</sup> A Johan, 'BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA *CULTURE OF POVERTY IN POVERTY REDUCTION IN INDONESIA*', *Sosio Informa*, 6.02 (2020), 114–32.

<sup>4</sup> Elisabeth Nainggolan, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019)', *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya : Penelitian Ilmu Manajemen*, 6.2 (2020), 89–99 <<https://doi.org/10.47663/jmbep.v6i2.58>>.

<sup>5</sup> Laily Nur Aini and Sulaiha Nor Islamy, 'Dampak Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, PDRB Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia', *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1.3 (2021), 132–41 <<https://doi.org/10.53088/jerps.v1i3.325>>.

<sup>6</sup> Miza Nina Adlini and others, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *EDUMASPUL JURNAL PENDIDIKAN*, 6.1 (2022), 1–6.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pandangan AK Coomaswamy, perenialisme diartikan sebagai ilmu yang akan tetap diterapkan dan tetap ada yaitu pengetahuan universal. Hal ini berlaku untuk seluruh manusia yang ada di dunia dimana mereka tidak memiliki batasan terhadap ruang dan waktu namun pada prinsip-prinsip universal.<sup>7</sup> Perenialisme menekankan pentingnya mengajarkan karya-karya klasik dalam bidang sastra, filsafat, dan sains. Karya-karya ini dianggap sebagai ekspresi nilai-nilai fundamental dan pengetahuan yang tidak tergantikan. Dalam hal ini, filsafat perenialisme memiliki beberapa aspek yang menarik, yaitu banyak cendekiawan yang berpegang pada pandangan ini terlibat dalam ilmu agama, sehingga filsafat perenialisme sangat berpengaruh dalam filsafat pendidikan agama. Dari penjelasan tersebut, filsafat perenialisme merupakan filsafat yang berasaskan pada nilai-nilai atau norma-norma yang dianggap menghabiskan waktu oleh kelompok masyarakat tertentu.

Secara historis, filsafat perenialisme memiliki prinsip-prinsip yang ada dari orientasi bipolar dalam filsafat budaya, yaitu "Perenialisme Theologis yang dibawa oleh Gereja Katolik di bawah pengaruh pemikiran Thomas Aquinas dan Perenialisme Seculer dalam kesetiiaannya pada pemikiran dan konsep filosofis." Hal tersebut setara dengan pandangan Azyumardi Azra tentang kelangsungan dan relasi filosofis perenialisme antar agama. Misanya, penganut agama kuno, yaitu "Zaman Bapa" menekankan pada pentingnya etika dan menempatkan moralitas pada pusat kehidupan spiritual. Mereka mengajarkan pentingnya memiliki empati, rasa kasih sayang, dan mengatasi keegoisan, keserakahan, serta kekerasan. Oleh karena itu, filsafat perenialisme menekankan pada konsep historis yang menjunjung tinggi kesatuan, realitas ketuhanan, dan berusaha membentuk ideologi dalam masyarakat.

Filsafat Perenialisme dalam pendidikan Islam berperan sebagai pelestarian kebudayaan manusia zaman dahulu yang tetap diterapkan pada masa sekarang dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pedoman hidup yang kuat, kukuh, dan ideal pada masa dahulu, yaitu pada abad pertengahan. Dalam hal ini, filsafat perenialisme memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi intelektual siswa dengan memberikan ilmu yang mutlak dan menyeluruh. Pendidikan filsafat perenialisme ini mampu mengasah kemampuan siswa untuk mengenali karya-karya dan tokoh-tokoh besar pada masa lalu yang dapat menjadi pedoman sebuah ilmu. Dari penjelasan tersebut, filsafat perenialisme menghargai warisan kebudayaan yang diterapkan pada masa lampau dan diterapkan juga hingga saat ini sebagai usaha pelestarian warisan luhur.

## PEMBAHASAN

Secara etimologis, istilah "kemiskinan" berasal dari kata "miskin," yang mengindikasikan kurangnya harta benda dan kekurangan dalam berbagai aspek. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum guna hidup layak. Lebih lanjut, kemiskinan dijelaskan sebagai suatu kondisi di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, termasuk kebutuhan makanan dan non-makanan, yang disebut sebagai garis kemiskinan atau batas kemiskinan<sup>8</sup>.

Beberapa ahli ilmu sosial di Indonesia menyampaikan konsep-konsep tentang kemiskinan. Menurut Suparlan (1984), kemiskinan adalah keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang. Kekurangan ini menyebabkan orang atau kelompok tersebut merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Ketidakmampuan ini dapat terjadi pada tingkat kebutuhan budaya, sosial, atau dasar. Kemiskinan, dengan demikian, dapat didefinisikan sebagai kondisi ketidakpenuhan kebutuhan dasar yang menjadi syarat untuk mencapai kesejahteraan individu.

---

<sup>7</sup> Ummi Puji Astutik, Khojir, "Perenialisme dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam", (Samarinda: Tambusai, 2023), hal. 3

<sup>8</sup> Dv Ferezegia, 'Analisis Tingkat Kemiskinan', *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1.1 (2018), 1–6  
<<http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>>.

Pandangan lain tentang kemiskinan disampaikan oleh Gunawan Sumodiningrat, yang merumuskan profil kemiskinan sebagai masalah kerentanan. Sebagai contoh, pembangunan di bidang pertanian mungkin telah meningkatkan pendapatan petani secara signifikan, tetapi musim kering berturut-turut dalam beberapa tahun dapat membuat tingkat kesejahteraan petani merosot drastis. Faktor alam menjadi penyumbang kerentanan dalam contoh ini. Selain itu, Sumodiningrat menyoroti bahwa kemiskinan juga mencakup tertutupnya akses pada peluang kerja. Hal ini disebabkan oleh hubungan produksi dalam masyarakat yang tidak memberikan kesempatan bagi partisipasi dalam kegiatan produksi. Meskipun seseorang bekerja, mereka mungkin terjebak dalam hubungan produksi yang tidak mendukung kesejahteraan.<sup>9</sup>

Kemiskinan mengacu pada kondisi di mana seseorang atau sekelompok individu mengalami kekurangan sumber daya material, seperti pendapatan, harta, atau akses ke layanan dasar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan dasar ini melibatkan makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan juga akses ke air bersih, sanitasi, dan energi. Berbagai faktor kompleks dapat menjadi penyebab kemiskinan, termasuk ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya peluang pendidikan dan pekerjaan, konflik, perubahan iklim, serta faktor struktural lainnya. Dampak kemiskinan pada kehidupan individu dan masyarakat cenderung bersifat negatif, melibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, serta pembatasan peluang ekonomi,<sup>10</sup>

Menurut World Bank (2002), penduduk miskin dapat dikategorikan berdasarkan komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada aspek komunitas, kemiskinan sangat dipengaruhi oleh infrastruktur. Keadaan infrastruktur sangat erat hubungannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang berkualitas baik akan mempermudah kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, serta memberikan kemudahan bagi investor untuk melakukan investasi di wilayah tersebut. Beberapa indikator pembangunan infrastruktur yang signifikan melibatkan saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Selain itu, indikator lain dari karakteristik komunitas termasuk akses yang setara terhadap peluang usaha atau pekerjaan, seperti keberadaan lembaga keuangan dan industri.<sup>11</sup>

Salah satu faktor tingginya angka kemiskinan di Indonesia adalah karena tingginya angka penduduk di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada 2023. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 275,7 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk Indonesia namun tidak diikuti dengan banyaknya jumlah lapangan tersedia membuat tingginya angka pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Angka ini 5,45 persen dari total angkatan kerja per tahun sebesar 146,62 juta tenaga kerja. Melalui angka diatas dapat dilihat bahwa meskipun angka tersebut perlahan membaik, akan tetapi masih sangat besar jumlah pengangguran di Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri juga merupakan masyarakat yang konsumtif. Berdasarkan pada data BPS pada 2021 penduduk Indonesia rata-rata menghabiskan Rp1,26 juta per bulan untuk konsumsi. Nilai itu bertambah sekitar Rp38.905 atau naik 3,17% dari tahun 2020, yang rata-ratanya Rp1,22 juta per bulan. Hal tersebut merupakan PR bagi pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan guna menekan angka tersebut dan menjauhkan dari garis kemiskinan.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan yang terjadi di wilayah Indonesia, salah satu faktornya adalah pengangguran. Pengangguran adalah permasalahan yang selalu ada

<sup>9</sup> Johan.

<sup>10</sup> Rifqi Habibi Sachrrial and Agus Iskandar, 'Analisa Perbandingan Complete Linkage AHC Dan K-Medoids Dalam Pengelompokan Data Kemiskinan Di Indonesia', 5.2 (2023) <<https://doi.org/10.47065/bits.v5i2.4310>>.

<sup>11</sup> Yoghi Citra Pratama, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia', *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1.2 (2019), 1–8 <<https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.9>>.

dan sulit untuk hindari bahkan oleh negara maju sekalipun. Walaupun demikian, pada umumnya pengangguran lebih banyak terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang. Tingginya angka pengangguran berdampak negative pada kinerja perekonomian. Pengangguran menyebabkan perekonomian tidak dapat mencapai kapasitas produksi maksimum<sup>12</sup>. Ketidakmampuan untuk mencapai berbagai aspek tersebut akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kurang mampu di sektor ini tetap tertinggal. Dampaknya mencakup pembentukan lapangan kerja yang terbatas, kurangnya penyerapan tenaga kerja, rendahnya efisiensi dan keterampilan kerja karena kurangnya pengetahuan bisnis yang memadai, kualitas pembangunan manusia yang rendah, penyempitan lahan dan aset, spesialisasi di bidang pertanian, ketidakberdayaan dalam melawan penguasa, peningkatan arus urbanisasi, serta kurangnya jaminan dan struktur sosial yang akan membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan mengurangi peluang untuk perubahan ekonomi.<sup>13</sup>

Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5% pada tahun 2011, namun diperkirakan menurun sebesar 6,0 hingga 6,3% pada tahun 2012 akibat menurunnya nilai ekspor Jepang ke negara tujuan akibat krisis global di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Pertumbuhan ekonomi yang belum termanfaatkan juga disebabkan oleh buruknya infrastruktur di Indonesia, sehingga menyebabkan peningkatan biaya produksi. Sistem birokrasi yang rumit juga ditengarai menjadi penghambat pembangunan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi penghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga pada akhirnya menurunkan efektivitas pengentasan kemiskinan.<sup>14</sup>

Penyebab utama pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya berbagai sumber daya dan peningkatan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dalam arti makroekonomi adalah peningkatan nilai riil PDB yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi hadir dalam dua bentuk. Yang pertama adalah pertumbuhan ekstensif, yaitu menggunakan lebih banyak sumber daya, dan yang lainnya adalah pertumbuhan intensif, yaitu penggunaan berbagai sumber daya secara lebih efisien (lebih produktif). Sekalipun pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, namun tidak menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita. Namun, ketika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui penggunaan sumber daya yang lebih produktif, termasuk tenaga kerja, pendapatan per kapita meningkat dan standar hidup rata-rata masyarakat meningkat.<sup>15</sup>

Permasalahan kemiskinan dan pembangunan tidak lepas dari peran pertanian dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan, meningkatkan kualitas gizi, dan meningkatkan perolehan devisa sebagai modal pembangunan nasional. Kemiskinan di sektor pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor dan seringkali dihadapkan pada dampak struktur dan budaya, terutama rendahnya produktivitas sektor tersebut. Hal ini disebabkan oleh semakin tidak meratanya distribusi lahan pertanian, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya sensitivitas teknologi, rendahnya nilai tukar petani, dan sulitnya akses permodalan.

Kegagalan untuk mencapai aspek-aspek tersebut berarti bahwa penghidupan masyarakat miskin di sektor ini masih belum berkembang, penciptaan lapangan kerja masih rendah dan penyerapan tenaga kerja, efisiensi dan keterampilan tenaga kerja kurang karena penyerapan

---

<sup>12</sup> Muhammad Arsyah Wildan Pratama, 'Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di D.I. Yogyakarta', 2019, 1–17 <<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/view/3689>>.

<sup>13</sup> Safira Maulidina, Vadilla Mutia Zahara, and Hady Sutjipto, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Pada Sektor Pertanian Di Indonesia Bagian Barat', *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 2.1 (2022), 257–69 <<https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.86>>.

<sup>14</sup> Yoghi Citra Pratama.

<sup>15</sup> Puji Yuniarti, Wiwin Wianti, and Nandang Estri Nurgaheni, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.3 (2020), 169–76 <<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>>.

tenaga kerja yang tidak memadai, rendahnya pengetahuan bisnis, rendahnya kualitas pekerja, dll. Pembangunan manusia, menyusutnya lahan dan kekayaan, spesialisasi di bidang pertanian, ketidakberdayaan di hadapan pihak berwenang, meningkatnya urbanisasi, kurangnya keamanan dan struktur sosial mengurangi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mengurangi kemungkinan tersebut. Tentang perubahan ekonomi. Indonesia merupakan negara agraris, dengan dua pertiga penduduknya bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian tahun 2020, wilayah merupakan lumbung sektor pertanian dan menyumbang tingginya nilai tambah (*value add*) sektor pertanian. Kemiskinan di Indonesia Bagian Barat Standar hidup petani yang masih tinggi Konsentrasi separuh penduduk disebabkan oleh rendahnya pendidikan petani dan kurangnya dukungan dari lembaga terkait dan pemerintah, sehingga menyebabkan kurangnya pertanian hijau di wilayah tersebut. Pembangunan sektor pertanian menjadi sarana strategis pengentasan kemiskinan, maka hal tersebut merupakan sebuah langkah yang penting.<sup>16</sup>

Dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, Presiden Republik Indonesia mencanangkan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program ini menetapkan titik-titik pembangunan yang terbagi dalam enam koridor utama dari Aceh hingga Papua. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjadi salah satu dari 10 negara teratas di dunia yang inklusif, adil dan berkelanjutan pada tahun 2025.

Pengembangan MP3EI didasari oleh semangat “Not Business As Usual” dan merupakan upaya rintisan melalui pergeseran pola pikir bahwa sukses tidaknya pembangunan ekonomi tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, melainkan pada pemerintah, bergantung pada kekuasaan pemerintah, dilakukan dengan pendekatan serupa. Kerjasama bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta. Sektor swasta memainkan peran sentral dan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan pemerintah memainkan peran regulasi, fasilitatif, dan katalitik.

Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan pelonggaran regulasi yang menghambat investasi (menghilangkan kemacetan). Pemerintah akan memberikan bantuan dan katalisator dengan menyediakan infrastruktur dan memberikan insentif finansial dan non-finansial. Implementasi MP3EI akan dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan delapan program besar yang terdiri dari kegiatan ekonomi besar. Strategi implementasi MP3EI mempunyai tiga unsur utama yaitu:

1. Pengembangan potensi perekonomian daerah di enam Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali-Nusa-Tenggara, Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.
2. Memperkuat konektivitas bangsa yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally Integrated and Globally Connected*).
3. Memperkuat sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa untuk mendukung pengembangan program-program utama di setiap koridor ekonomi.

Pembuatan MP3EI bukan dimaksudkan untuk menggantikan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ada seperti RPJPN dan RPJMN, melainkan menjadi dokumen yang terpadu dan saling melengkapi serta dokumen penting khusus yang mampu mempercepat dan memperluas pembangunan (MP3EI, Kementerian Koordinator Perekonomian). Saat ini, Indonesia adalah negara terbesar ke-15 berdasarkan PDB dan salah satu negara G-20. Tingginya tingkat PDB sebesar tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan dan

---

<sup>16</sup> Maulidina, Zahara, and Sutjipto.

kekayaan. Hal ini tercermin dari memburuknya indeks Gini yang naik dari 0,3 pada tahun 2011 menjadi 0,4. Hal ini demi kepentingan kita semua untuk menciptakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam meminimalisir peningkatan kemiskinan bisa dilakukan hal sebagai berikut :

1. Diinginkan agar pemerintah meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan secara merata dan memperbaiki akses ke fasilitas pendidikan untuk menciptakan perasaan keamanan di masyarakat. Upaya yang efektif melibatkan pengembangan sekolah menengah kejuruan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan, dan membuka usaha sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki oleh individu tersebut.
2. Diharapkan pemerintah terus meningkatkan dan menyediakan program Jaminan Kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu guna meningkatkan produktivitas mereka. Rumah sakit juga diinginkan memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat.
3. Pemerintah sebaiknya memberikan arahan kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi dalam mengatasi kemiskinan dan memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan dalam pembangunan sanitasi. Pemerintah juga sebaiknya menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan program kredit pembangunan sanitasi bagi masyarakat yang belum mampu melakukannya.
4. BKKBN diharapkan terus memberikan penyuluhan agar masyarakat menyadari dan mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk mencegah pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan saat masyarakat memasuki usia produktif, sehingga mereka dapat menyalurkan keterampilan mereka dan mencegah peningkatan tingkat kemiskinan.<sup>17</sup>

Pendidikan merupakan faktor krusial yang dapat mengantarkan seseorang keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam tingkat tertentu, pendidikan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dalam memperbaiki situasi ekonomi keluarga. Lebih dari sekadar menjadi sarana untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan juga berperan sebagai alat yang membutuhkan kreativitas dan daya saing dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Kemampuan dan ketrampilan yang diasah melalui pendidikan memungkinkan seseorang menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Praktek pendidikan diharapkan dapat menciptakan kondisi kemajuan yang merata di semua lapisan masyarakat. Pendidikan diharapkan mampu membentuk individu dan kelompok masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab, menyadari hak dan kewajibannya. Selain itu, pendidikan diharapkan dapat mempersiapkan individu dan kelompok masyarakat untuk masuk ke pasar tenaga kerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai.<sup>18</sup>

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, diperlukan perbaikan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama terkait distribusi bantuan di tingkat masyarakat desa/kelurahan. Kunci utama keberhasilan program yang telah dilaksanakan adalah ketepatan sasaran. Kendala yang sering muncul di tingkat masyarakat adalah adanya bias pelaksanaan dalam distribusi bantuan, yang disebabkan oleh adanya diskresi di kalangan petugas. Oleh karena itu, penggunaan diskresi oleh implementator di tingkat bawah (*street-level bureaucracy*) perlu mendapatkan pengawasan yang menyeluruh dari pemerintah dan masyarakat. Pengawasan ini penting agar ke depannya pemerintah dapat

---

<sup>17</sup> Bagus Adhitya, Agus Prabawa, and Heris Kencana, 'Analisis Pengaruh Pendidikan , Kesehatan , Sanitasi Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Di Indonesia', 6.1 (2022), 288–95 <<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>>.

<sup>18</sup> Aini and Islamy.

menjamin bahwa distribusi bantuan dilaksanakan sesuai dengan sasaran, mengikuti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana di lapangan. Keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masyarakat perlu didukung oleh koordinasi yang baik di lapangan dan komitmen yang kuat dari implementator untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan di mana individu atau sekelompok orang mengalami kekurangan sumber daya material yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Di Indonesia, pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor tingginya angka kemiskinan. Masalah pengangguran juga menjadi perhatian serius, dengan sejumlah besar penduduk yang konsumtif. Meskipun terjadi perbaikan, jumlah pengangguran masih signifikan. Kendala infrastruktur yang buruk, sistem birokrasi yang rumit, dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang optimal. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar namun tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita disoroti sebagai isu. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan memerlukan perbaikan implementasi kebijakan, distribusi bantuan yang tepat sasaran, peningkatan infrastruktur, pengawasan yang efektif, dan upaya nyata dalam meningkatkan sektor pertanian. Koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terlibat menjadi kunci dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, Bagus, Agus Prabawa, and Heris Kencana, 'Analisis Pengaruh Pendidikan , Kesehatan , Sanitasi Dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Di Indonesia', 6.1 (2022), 288–95 <<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>>
- Aini, Laily Nur, and Sulaiha Nor Islamy, 'Dampak Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, PDRB Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia', *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1.3 (2021), 132–41 <<https://doi.org/10.53088/jerps.v1i3.325>>
- Ferezegia, Dv, 'Analisis Tingkat Kemiskinan', *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1.1 (2018), 1–6 <<http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>>
- Johan, A, 'BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA CULTURE OF POVERTY IN POVERTY REDUCTION IN INDONESIA', *Sosio Informa*, 6.02 (2020), 114–32
- Juanda, Reza, and Muhammad Kahpi, 'Jurnal Ekonomika Indonesia Volume 12 Nomor 1 URL : <https://Ojs.Unimal.Ac.Id/Index.Php/Ekonomika> PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH , TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh', 12 (2021), 19–31
- Maulidina, Safira, Vadilla Mutia Zahara, and Hady Sutjipto, 'Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Pada Sektor Pertanian Di Indonesia Bagian Barat', *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 2.1 (2022), 257–69 <<https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.86>>
- Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *EDUMASPUL JURNAL*

---

<sup>19</sup> Rakhmat and Firdaus, 'DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA', *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, 1 (2019), 33–38.

- PENDIDIKAN, 6.1 (2022), 1–6
- Nainggolan, Elisabeth, ‘Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019)’, *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya : Penelitian Ilmu Manajemen*, 6.2 (2020), 89–99  
<<https://doi.org/10.47663/jmbep.v6i2.58>>
- Nasution, Anisah Salsabila, and Khairina Tambunan, ‘Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara’, *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3.1 (2022), 11–25
- Pratama, Muhammad Arsyah Wildan, ‘Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di D.I. Yogyakarta’, 2019, 1–17  
<<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ep/article/view/3689>>
- Pratama, Yoghi Citra, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia’, *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1.2 (2019), 1–8  
<<https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.9>>
- Rakhmat, and Firdaus, ‘DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA’, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, 1 (2019), 33–38
- Sachrrial, Rifqi Habibi, and Agus Iskandar, ‘Analisa Perbandingan Complete Linkage AHC Dan K-Medoids Dalam Pengelompokan Data Kemiskinan Di Indonesia’, 5.2 (2023)  
<<https://doi.org/10.47065/bits.v5i2.4310>>
- Yuniarti, Puji, Wiwin Wianti, and Nandang Estri Nurgaheni, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia’, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.3 (2020), 169–76  
<<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>>